

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan adalah serangkaian informasi yang mencerminkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Menurut Budiman (2021), laporan ini berfungsi sebagai dokumen yang menggambarkan keadaan finansial perusahaan sepanjang periode tertentu dan indikator untuk menilai kinerja perusahaan yang membantu dalam penentuan strategi dan pengambilan keputusan, baik oleh pihak internal maupun eksternal yang memiliki kepentingan. Ini juga berkontribusi pada keyakinan mengenai kelangsungan hidup perusahaan. Murhadi (2019) menambahkan bahwa laporan keuangan dapat dipandang sebagai bahasa bisnis yang menyajikan data yang telah diolah mengenai posisi keuangan perusahaan kepada para pengguna laporan. Hal tersebut memunculkan adanya keinginan pihak perusahaan untuk dapat merancang dan menyajikan informasi laporan keuangan sebaik mungkin yang dapat menunjukkan kesuksesan perusahaan dan berusaha untuk menyembunyikan atau menutupi kekurangan yang ada guna menarik minat investor, kreditur, dan pihak pengguna laporan keuangan lainnya. Tindakan tersebut akan memunculkan suatu risiko kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) yang cukup besar (Faradiza, 2019).

Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan melawan hukum atau tata peraturan yang berlaku ditandai dengan tindakan tidak jujur seperti penggelapan maupun pelanggaran kewenangan. Tindakan tersebut bergantung pada ancaman kekerasan

tanpa menggunakan kekuatan fisik yang digunakan oleh seseorang atau organisasi untuk keuntungan pribadi maupun pihak tertentu yang melakukan tindakan *fraud* (ACFE, 2024). Kecurangan merupakan satu dari dua tipe kesalahan yang dikenal dalam dunia akuntansi, satu lainnya adalah kekeliruan. Perbedaan mendasar antara kekeliruan dan kecurangan terletak pada unsur kesengajaan (kecurangan) dan ketidaksengajaan (kekeliruan). Kecurangan laporan keuangan adalah tindakan sengaja oleh manajemen untuk memanipulasi jumlah dalam laporan keuangan guna menyesatkan pengguna laporan keuangan (Abbas & Laksito, 2022). Kecurangan yang biasanya terjadi adalah dengan melaporkan nilai aset yang dilebih-lebihkan maupun pendapatan yang diperoleh perusahaan dari nilai yang sebenarnya (*overstatement*), atau melaporkan kewajiban dengan mengurangi nilai atau lebih rendah dari nilai yang sebenarnya (*understatement*) (Rizaldi & Shonhadji, 2022).

Berdasarkan rilis Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) bertajuk *Asia-Pacific Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations*, Indonesia berada diperingkat ke-3 di wilayah Asia-Pasifik sebagai negara yang memiliki jumlah *fraud* di tahun 2024 dengan catatan sebanyak 25 kasus. *Fraud* terbesar di Indonesia adalah korupsi dengan persentase sebesar 64%, penyalahgunaan aktiva/kekayaan negara & perusahaan perolehan persentase sebesar 28,9%, dan *fraud* laporan keuangan dengan perolehan presentase sebesar 6,7%. Hasil survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia pada tahun 2019 terhadap *fraud* yang terjadi di Indonesia ditemukan adanya 239 jumlah kasus *fraud* dengan temuan sebagai berikut:

1. Terdapat 167 kasus korupsi dengan total kerugian Rp376.650.000.000
2. Terdapat 50 kasus penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan dengan total kerugian Rp257.520.000.000
3. Terdapat 22 kasus *fraud* laporan keuangan dengan total kerugian mencapai Rp242.260.000.000

Pengungkapan *fraud* tersebut paling banyak ditemui melalui media laporan dengan persentase 38,9%, diikuti dengan media audit internal dengan persentase sebesar 23,4%, lainnya sebesar 15,1%, dan media audit eksternal dengan perolehan persentase sebesar 9,6%. Berdasarkan survei tersebut, maka dapat diketahui bahwa kecurangan laporan keuangan merupakan *fraud* dengan jumlah kerugian cukup besar meskipun kasus yang ditemui berjumlah kecil, didukung media laporan keuangan yang menjadi pengungkap *fraud* dengan persentase terbesar (ACFE, 2019).

Berbagai industri yang terlibat dalam praktik kecurangan turut disebutkan dalam laporan yang dipublikasikan oleh ACFE (2024). Tiga industri dengan jumlah kasus terbanyak berturut-turut adalah *banking and financial services* dengan 305 kasus, industri *manufacturing* dengan 175 kasus, dan *government and public administration* dengan 170 kasus. Dari ketiga industri tersebut, industri manufaktur tercatat mengalami kerugian terbesar, yaitu senilai US\$267.000. Menurut Deloitte (2021) dalam Indriani dan Rohman (2022), industri manufaktur disebut sebagai salah satu yang paling rawan terhadap risiko kecurangan, dengan sektor barang konsumen primer (*consumer non-cyclicals*) termasuk di dalamnya. Barang konsumsi digambarkan memiliki sifat penjualan yang cepat dibandingkan

dengan industri lain karena produk yang dihasilkan berupa barang kebutuhan pokok. Tingginya perputaran barang tersebut meningkatkan potensi terjadinya kecurangan (Indriani & Rohman, 2022).

Fenomena kasus skandal kecurangan laporan keuangan yang terjadi pada perusahaan yang berada di Indonesia khususnya perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor barang konsumen primer (*consumer non-cyclicals*) pernah melanda PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) pada tahun 2018. Kasus ini bermula dari ditemukannya anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food yaitu PT Indo Beras Unggul (IBU) mengepul beras petani bersubsidi untuk diproses dan dikemas ulang menjadi beras premium. Akibat dari kejadian ini, saham AISA turun signifikan dan membuat perusahaan berusaha mempercantik laporan keuangan tahun 2017. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2018, pemegang saham mengajukan investigasi terhadap laporan keuangan 2017 dan menunjuk Ernst & Young Indonesia (EY) untuk melakukan audit kembali atas laporan keuangan tahun 2017. Dalam laporan hasil investigasi tersebut ditemukan adanya kecurangan laporan keuangan yaitu pencatatan keuangan yang berbeda dengan yang dipergunakan oleh auditor dalam melakukan audit laporan keuangan tahun buku 2017. Berikut adalah temuan dari Ernst & Young Indonesia (EY):

1. Dugaan *overstatement* sebesar Rp4 triliun ditemukan pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap grup TPSF, serta sebesar Rp662 miliar pada penjualan dan Rp329 miliar pada EBITDA Entitas Food.

2. Aliran dana sebesar Rp1,78 triliun diduga dilakukan melalui berbagai skema dari grup TPSF kepada pihak-pihak yang terafiliasi dengan manajemen lama, antara lain melalui pencairan pinjaman grup TPSF dari beberapa bank, pencairan deposito berjangka, transfer dana di rekening bank, serta pembiayaan beban pihak terafiliasi oleh grup TPSF.
3. Pengungkapan yang memadai terkait hubungan dan transaksi dengan pihak terafiliasi tidak ditemukan dalam laporan kepada pemangku kepentingan yang relevan, yang berpotensi melanggar Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. (BINUS University School of Accounting, 2021).

Kasus fraud lainnya yang melibatkan sektor barang konsumen primer (*consumer non-cyclicals*) yang telah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan pada tahun 2019 dan kembali diangkat pada bulan Maret tahun 2024 setelah adanya laporan dari Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia terkait adanya dugaan *fraud* yang dilakukan oleh empat debitur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Salah satu debitur LPEI yang disinyalir melakukan *fraud* ini adalah perusahaan berinisial PT RII yang bergerak di bidang kelapa sawit dengan kerugian sebesar Rp1,8 Triliun. PT RII diduga melakukan tindakan *fraud* dengan meningkatkan nilai *collateral* (jaminan) yang tidak sesuai dan tidak semestinya seperti memberikan jaminan dengan nilai kecil (tidak semestinya) dan fiktif (tidak sesuai), serta adanya pekerjaan ataupun pembiayaan tidak sesuai dengan tujuannya (Nugroho, 2024).

Teori yang membahas tentang kecurangan khususnya mengenai faktor yang dapat memicu terjadinya *fraud* adalah teori *fraud pentagon*. Teori yang diperkenalkan oleh Crowe Howarth pada tahun 2011 ini sebagai bentuk penyempurnaan dari teori *fraud triangle* dan *fraud diamond* dengan menambahkan satu faktor yang dianggap dapat berpengaruh dalam peningkatan kejadian kecurangan yakni *arrogance* (arogansi). Faktor awal dalam teori *fraud pentagon* yang mempengaruhi kecurangan dalam pelaporan keuangan adalah tekanan (*pressure*) yang merujuk pada dorongan seseorang untuk terlibat dalam tindakan penipuan, faktor ini salah satunya dapat ditunjukkan melalui *financial target* yang ditetapkan oleh perusahaan. Menurut *American Institute of Certified Public Accountant (2018)* manajer dapat merasa tertekan untuk terlibat dalam kecurangan akibat ancaman terhadap target keuangan untuk mencapai profitabilitas perusahaan yang berasal dari kondisi ekonomi, lingkungan industri, dan situasi lainnya. Dalam upaya untuk mencapai target tersebut, manajemen memutuskan untuk mengeksploitasi strategi keuangan yang melibatkan manipulasi laporan keuangan, termasuk menyesuaikan *financial target* untuk menciptakan kesan bahwa perusahaan telah mencapai sasaran keuangan yang ditetapkan (Agustina & Pratomo, 2019).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kecurangan dalam pelaporan keuangan adalah kesempatan dengan merujuk pada peluang terjadinya tindakan penipuan yang salah satunya dapat ditunjukkan melalui *ineffective monitoring* dalam perusahaan. Menurut *American Institute of Certified Public Accountant (2018)* menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang tidak berjalan efektif

akan memunculkan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan karena ketidakefektifan pengawasan (*ineffective monitoring*). Ketidakefektifan pengawasan dapat memberikan kesempatan bagi praktik kecurangan dalam pelaporan keuangan. Hal ini menciptakan persepsi bahwa manajemen tidak mendapatkan pengawasan yang ketat sehingga pelaku kecurangan dapat memanfaatkan situasi ini untuk melakukan manipulasi dalam pelaporan keuangan tanpa terdeteksi (Agustina & Pratomo, 2019).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan berikutnya adalah rasionalisasi, yang didefinisikan sebagai pembenaran yang muncul dalam pikiran manajemen setelah kecurangan terjadi. Pemikiran ini timbul karena manajemen tidak ingin perbuatannya terungkap, sehingga mereka membenarkan manipulasi yang telah dilakukan (Sari & Nugroho, 2020). Faktor ini dapat terlihat dari adanya *change in auditor* (pergantian auditor) di dalam perusahaan. Pergantian auditor dalam periode tertentu membuka peluang bagi perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan. Pergantian tersebut dimaksudkan agar tindakan kecurangan tidak terdeteksi oleh auditor yang baru (Larum et al., 2021).

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi kecurangan dalam pelaporan keuangan adalah kemampuan yang didefinisikan sebagai kedudukan atau peran seseorang dalam struktur organisasi, faktor ini dapat diukur salah satunya dengan melihat pada *change in director* yang terjadi dalam perusahaan. Menurut temuan penelitian Nadziliyah & Primasari (2022), tingkat kecurangan laporan keuangan ditemukan cenderung lebih rendah ketika pergantian direksi dilakukan, sedangkan

ketidakadaan pergantian direksi justru dikaitkan dengan meningkatnya tingkat kecurangan. Pergantian direksi digunakan oleh perusahaan sebagai strategi untuk melakukan *reshuffle* jajaran direksi baru, dengan tujuan meningkatkan performa perusahaan dan mengurangi potensi tindakan *fraud* (Putra & Lestanti, 2023).

Faktor berikutnya yang digunakan untuk melihat indikasi terjadinya suatu kecurangan dalam pelaporan keuangan adalah arogansi yang salah satunya dapat ditunjukkan melalui *frequent number of CEO's pictures*. Sikap arogan dalam konteks kecurangan laporan keuangan dapat muncul ketika seorang CEO bersedia menggunakan segala cara untuk menjaga kedudukannya di dalam perusahaan, dengan menonjolkan status dan posisinya kepada masyarakat luas. Foto atau gambar CEO yang terpampang dalam laporan tahunan perusahaan dapat diamati sebagai salah satu indikator. Berdasarkan teori *fraud pentagon*, arogansi CEO diidentifikasi sebagai faktor yang dapat memicu terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan. Foto dan informasi mengenai rekam jejak CEO yang disajikan dalam acara tahunan laporan dinilai dapat mencerminkan tingkat arogansi dan superioritas yang dimiliki oleh CEO. (Utami & Pusparini, 2019).

Penelitian mengenai kecurangan laporan keuangan sebelumnya pernah dilakukan oleh (Maladewi & Putra, 2022) dengan menggunakan variabel *fraud pentagon* dalam meneliti kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. Hasilnya menunjukkan bahwa pergantian auditor dan pergantian direktur tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan, variabel target keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Selain itu, variabel jumlah foto CEO berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Qintharah & Riyanti (2023) juga menggunakan variabel *fraud pentagon* dalam meneliti kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar pada BEI tahun 2019-2021. Hasilnya menunjukkan bahwa target keuangan berpengaruh negatif terhadap *fraudulent financial reporting*, sedangkan pergantian auditor, dan pergantian dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting* serta frekuensi kemunculan gambar CEO berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting*. Penelitian selanjutnya oleh Sawu et al., (2023) menggunakan variabel *fraud pentagon* dalam meneliti kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021. Hasilnya menunjukkan bahwa target keuangan dan pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sedangkan rasionalisasi, pergantian auditor, dan frekuensi kemunculan gambar CEO tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Penelitian yang dilakukan oleh Syavira & Aliyah (2023) hasil dari penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu *change in auditor* berpengaruh negatif terhadap *financial statement fraud* pada perusahaan manufaktur sektor industri dan barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Penelitian selanjutnya dilakukan Ghaisani & Supatmi (2023) yang menunjukkan hasil bahwa *financial target* dan *change of director* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan, *variabel change in auditor* dan *frequent number of CEO's picture* tidak berpengaruh

terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Fitriana (2021) dengan judul penelitian *Fraudulent Financial Reporting* dengan Pendekatan *Fraud Pentagon Theory* pada Perusahaan Sektor Bumn Tahun 2015-2019. Hasil yang ditemukan menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan, pergantian auditor dan pergantian direksi tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ferari (2019) dengan judul *Deteksi Financial Statement Fraud* dengan Analisis *Fraud Pentagon* pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018) mengemukakan hasil bahwa target keuangan dan jumlah foto CEO yang terpampang berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan, pergantian auditor dan pergantian direksi tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian dengan objek serupa namun sektor yang berbeda dilakukan oleh Haq & Rahardjo (2024) yang menyatakan hasil bahwa pergantian dewan direksi berpengaruh positif, Sedangkan, target keuangan terbukti tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat inkonsistensi antara variabel independen yaitu *fraud pentagon* terhadap kecurangan laporan keuangan serta adanya kasus kecurangan pelaporan keuangan yang terjadi pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumen primer (*consumer non-cyclicals*). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul "**PENGARUH *FRAUD PENTAGON* TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR BARANG KONSUMEN PRIMER (*CONSUMER NON-CYCLICALS*) YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2020 – 2023**".

1.2. Rumusan Masalah

Pentingnya laporan keuangan sebagai indikator kesehatan perusahaan tetapi juga mengungkap kecenderungan perusahaan untuk mempercantik laporan guna menarik investor membuka celah terjadinya kecurangan. Kasus konkret yang terjadi di Indonesia dengan sedikit kasus kecurangan laporan keuangan namun mempunyai nilai yang sangat signifikan menunjukkan risiko kecurangan yang kompleks. Survei ACFE Indonesia Chapter menegaskan bahwa *fraud*, terutama yang terkait dengan laporan keuangan memiliki dampak besar dengan kerugian materi yang signifikan. Dengan adanya pengungkapan *fraud* melalui media laporan keuangan serta adanya inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu terkait kecurangan laporan keuangan, maka rumusan masalah penelitian disusun sebagai berikut:

1. Apakah *financial target* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah *ineffective monitoring* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah *change in auditor* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?

4. Apakah *change in director* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
5. Apakah *frequent number of CEO's picture* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari komponen *fraud pentagon* yakni *financial target*, *ineffective monitoring*, *change in auditor*, *change in director*, dan *frequent number of CEO's picture* terhadap kecurangan laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor barang konsumen primer (*consumer non-cyclicals*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 – 2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang meliputi:

1. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi Kantor Akuntan Publik dan perusahaan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan dengan memperhatikan aspek yang ada pada *fraud pentagon* model serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat meminimalisir risiko kecurangan yang mana nantinya dapat bermanfaat dan memberikan rasa aman kepada para pemangku kepentingan selaku pengguna laporan keuangan.

2. Manfaat Regulasi

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi regulasi bagi Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia dalam merancang kebijakan serta standar akuntansi keuangan dengan lebih efektif di masa depan, sehingga mampu meminimalkan risiko kecurangan dalam laporan keuangan.

